

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA NAGA
RANTAI KECAMATAN LUNGKANG KULE
KABUPATEN KAUR**

Oleh:
Anwar Hamid¹

ABSTRAKSI

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat *community development* sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?”. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik korelasi dengan populasi penelitian seluruh kepala rumah tangga yang ada di desa Naga Rantai. Sedangkan analisis data menggunakan rumus-rumus statistik, di antaranya Koefisien Korelasi Product Moment dan Koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi pearson product moment, terdapat hasil yang positif dengan kata lain yang berkorelasi dengan variabel tersebut. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan pada Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, berada pada interpretasi sedang.

Kata Kunci: *Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat*

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

A. Pendahuluan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat *community development* sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pemerintah yang efektif adalah pemerintahan yang mampu melibatkan rakyat dalam proses kebijakan publik dan menjadikan rakyat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukannya partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu, Sehingga perencanaan daerah harus dilakukan dengan model dari bawah (*bottom-up planning*) atau yang disebut sebagai perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Akan tetapi pada kenyataannya perencanaan itu sendiri masih banyak dilakukan dari atas (*top-down planning*).

Demikian halnya dengan desa, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam merencanakan program-program pembangunan. Masyarakat dibina dan dibimbing untuk menyusun rencana program-program pembangunan. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan masih sangat kurang. Tidak tahu pasti, apakah dikarenakan kurangnya dukungan dari atas ataukah masyarakat sendiri yang tidak mau berpartisipasi. Dari informasi yang didapat, penulis melihat bahwa masih kurangnya masyarakat yang mau berpartisipasi dalam merencanakan program-program pembangunan. Butuhnya

seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi dan mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam merencanakan program-program pembangunan.

Dengan adanya dukungan dari atas, masyarakat akan tergerak untuk berperanserta dalam perencanaan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dari pandangan tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan memerlukan adanya rangsangan dari atas, dalam hal ini seorang kepala Desa. Sangat diharapkannya seorang pemimpin yang mampu untuk berperan aktif mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi. Perlunya seorang pemimpin yang demokratis agar mau membimbing, menggerakkan masyarakatnya dan mampu bertanggung jawab serta bekerjasama dalam membangun dan menata kembali daerahnya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian sebagai berikut: "*Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Naga Rantai Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur*".

B. Kerangka Teori

1. Kepemimpinan

Pada dasarnya kepemimpinan mengacu pada suatu proses untuk menggerakkan sekelompok orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan/disepakati bersama dengan mendorong atau memotivasi mereka untuk bertindak dengan cara yang tidak memaksa. Dengan kemampuannya seorang pemimpin yang baik harus mampu menggerakkan orang-orang menuju tujuan jangka panjang dan betul-betul merupakan upaya memenuhi kepentingan mereka yang terbaik. Dengan demikian kepemimpinan dapat dikatakan sebagai peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. (Rivai 2004:64). Selanjutnya, Kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu team untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu. (Bintoro, 1987: 110)

Sehubungan dengan itu, dapat diuraikan beberapa persyaratan kepemimpinan yaitu sebagai berikut: jujur, berpengetahuan, berani, tegas, dapat diandalkan, berinisiatif, bijaksana, adil, gairah, ulet, tidak mementingkan diri sendiri, setia, heru-hawa, dan mampu membuat pertimbangan. (Mar'at 1985:48) Demikian dapat di lihat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, diperlukannya syarat-syarat yang sangat kuat agar seorang pemimpin dapat memimpin anggotanya atau kelompoknya dengan bijaksana serta bertanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga yang sangat penting bagi seorang pemimpin dalam kegiatannya sebagai komunikator ialah adanya faktor daya tarik komunikator dan faktor kepercayaan pada komunikator. (Sunindhia; Widiyanti, 1993:23)

Adapun fungsi dari pada kepemimpinan adalah: Sebagai pemandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi dan membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. (Kartono, 2005: 93)

Selanjutnya fungsi kepemimpinan adalah untuk dapat menciptakan visi dan rasa komunitas, membantu mengembangkan komitmen daripada sekedar memenuhinya, menginspirasi kepercayaan, mengintegrasikan pandangan yang berlainan, mendukung pembicaraan yang cakap melalui dialog, membantu menggunakan pengaruh mereka, memfasilitasi, memberi semangat pada yang lain, menopang tim, bertindak sebagai model. (Veithzal, 2004: 95)

2. Desa

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 63 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia, partisipasi masyarakat adalah hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta (Salim, 2002: 110). Dimaksud dengan partisipasi adalah ke ikut sertaan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dengan penghimpunan atau menyumbangkan benda dan uang, pikiran atau ide maupun dengan tenaga atau gotong royong. (Nitisemito, 1982: 21)

Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha

menyatakan bahwa belum ada defenisi yang memuaskan mengenai istilah partisipasi. Oleh karena itu mereka membatasinya pada “developmental participation” atau partisipasi di bidang pembangunan, dalam hal ini berarti partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sudah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyak mungkin orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuannya guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai “pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Apabila ditafsirkan maka “partisipasi” dalam hal ini menunjukkan adanya keterlibatan mental dan emosional seseorang terhadap situasi kelompok atau komunitas di mana ia menjadi anggotanya, yang selanjutnya mendorong individu yang bersangkutan untuk memberikan kontribusi atau sumbangan tertentu serta bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepentingan bersama. Ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yaitu:

- a. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat.
- b. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarah mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
- c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, serta rencana yang telah ditetapkan.
- d. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam

pembangunan yang berencana. (Sintoro, 1987: 222)

Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan maka pengertian partisipasi yang dikemukakan oleh Davis tersebut setidaknya-tidaknya mengandung tiga pokok pikiran, yaitu:

- a. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan dan mental serta emosional. Kehadiran secara fisik/pribadi semata-mata dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
- b. Kesiediaan memberikan kontribusi tergerakkan. Wujud kontribusi dalam pembangunan dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan, buah pikiran, keterampilan dan sebagainya.
- c. Kesiediaan untuk bertanggung jawab tergerakkan. (Ndraha, 1981:124)

Dengan demikian konsepsi partisipasi dalam pembangunan memiliki perspektif yang luas. Seseorang dikatakan telah berpartisipasi apabila ia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan baik secara fisik maupun mental. Keterlibatan individu tersebut dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kontribusi baik yang bersifat material seperti jasa, tenaga, buah pikiran, keterampilan dan sebagainya. (Bintoro, 1987: 222)

Ndraha (1981: 74) mengemukakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi hal sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
- b. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima baik yang bersifat menolak, menerima dengan syarat atau menerima dengan sepenuhnya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima kembali hasil-hasil pembangunan.

4. Perencanaan Pembangunan

Dalam beberapa literatur perencanaan pembangunan (*development planning*), pembahasan terhadap pentingnya perencanaan ini sering dikaitkan dengan pembangunan itu sendiri. Pentingnya

aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua topik utama, yaitu:

- a. Perencanaan sebagai “alat” dari pembangunan
- b. Pembangunan sebagai tolak-ukur dari berhasil tidaknya pembangunan tersebut.

Perencanaan dianggap sebagai “alat” pembangunan, karena perencanaan memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalanya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakan (tidak sistematis) dan tidak memperhatikan aspirasi *target group* (sasaran), maka pembangunan yang di hasilkan juga tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian dalam konteks perencanaan sebagai “alat”, maka ia mempunyai keunggulan koprehensif; yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat penentuan berbagai alternatif dari berbagai kegiatan pembangunan.
- c. Perencanaan dapat dipakai sebagai penentuan skala prioritas.
- d. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat “peramalan” (*forecasting*) dari kegiatan pada masa akan datang.

Disisi lain, perencanaan dapat dipandang sebagai “tolak ukur” dari keberhasilan dan kegagalan dari pembangunan yang mengandung arti bahwa kegiatan pembangunan yang “gagal” bisa jadi karena aspek perencanaannya yang “tidak baik”, dan begitu pula sebaliknya. Sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan pembangunan, maka perencanaan selalu direvisi pada setiap saat atau pada jangka waktu tertentu. Maksudnya, tentu saja untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan untuk dipakai sebagai pedoman perbaikan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. (Soekartiwi, 1990: 24)

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 2004 Perencanaan Pembangunan terdiri atas empat tahap, yaitu:

- a. Tahap penyusunan rencana
Tahap ini di laksanakan untuk dapat menghasilkan rancangan lengkap

suatu rencana yang sudah siap untuk di tetapkan terdiri dari empat langkah:

- 1) Penyiapan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur.
- 2) Masing-masing instansi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rencana pembangunan yang telah disiapkan.
- 3) Melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang).
- 4) Langkah terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

- b. Tahap penetapan rencana
Tahap ini dimana penetapan rencana tersebut menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak yang melaksanakannya.

- c. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana
Tahap ini dimaksudkan untuk menjamin tercapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang pada rencana kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

- d. Evaluasi pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan adalah bagian dari perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan sasaran dan kinerja pembangunan.

5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih diuji kebenarannya. Berdasarkan konsep dan teori sebagaimana penulis kemukakan diatas, maka penulis akan mengemukakan hipotesis penelitian yakni “Terdapat Pengaruh yang Positif dan Signifikan Antara Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan”.

Jika:

$H_a : p \neq 0$, “tidak sama dengan nol”
berarti lebih besar dari nol atau (-) dari nol
berarti ada

pengaruhnya dan hipotesa ini dapat diterima

$H_0 : p = 0$, 0 berarti ini tidak ada pengaruhnya dan hipotesa ini ditolak.

6. Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989: 32).

Berdasarkan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, maka yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Gaya kepemimpinan adalah pola atau tingkah laku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain, di mana gaya kepemimpinan yang biasa digunakan adalah gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, dan *laissez faire*.
- b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik secara fisik, mental maupun materi dalam menyusun program-program kegiatan pembangunan demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

7. Definisi Operasional!

Definisi operasional pada dasarnya adalah petunjuk bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang melekat dalam variabel sebagai pendukung untuk dianalisis ke dalam variabel tersebut. Berikut ini akan diuraikan variabel yang diteliti beserta indikator-indikator yang di pakai sebagai alat pengukurnya.

- a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Gaya Kepemimpinan indikatornya adalah:

- 1) Kepemimpinan Demokratis diukur dengan:
 - a) Memberikan bimbingan yang efisien kepada bawahan
 - b) Memberi kebebasan mengeluarkan pendapat
 - c) Membuat keputusan bersama dengan anggota kelompok

- d) Senang menerima saran dan kritik
- e) Mengutamakan kerja sama

- 2) Kepemimpinan Otokratis diukur dengan:

- a) Kurang mempercayai anggota kelompoknya
- b) Otoriter
- c) Kurang perhatian terhadap anggota kelompoknya
- d) Senantiasa membuat keputusan sendiri
- e) Kurang toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan anggota kelompok

- 3) Kepemimpinan *Laissez Faire* diukur dengan:

- a) Tidak yakin pada kemampuan sendiri
- b) Tidak berani menetapkan tujuan untuk kelompok
- c) Tidak berani menanggung resiko
- d) Membatasi komunikasi dan hubungan kelompok

- b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan indikator:

- a. Frekuensi kehadiran dalam rapat yang membicarakan program-program tentang pembangunan.
- b. Pernah tidaknya mengajukan saran untuk pembangunan desa.
- c. Frekuensi keterlibatan secara fisik dalam pelaksanaan operasional program pembangunan.
- d. Intensitas pemberian sumbangan/kontribusi yang bersifat material seperti uang, barang atau bahan.
- e. Pernah tidaknya mengadakan evaluasi terhadap program pembangunan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi, yaitu mencoba meneliti hubungan antara satu variabel independen dengan satu dependen. Penelitian dilaksanakan di Desa Naga Rantai Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah kepala rumah tangga yang ada di desa Naga Rantai. Desa Naga Rantai merupakan desa yang terdiri dari 631 Kepala Keluarga. Untuk penentuan sampel

pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel berdasarkan Rumus Taro Yamane dalam buku Rakhmat (2007: 82) dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 86 kepala rumah tangga. Selain sampel di atas, penulis juga menggunakan beberapa informan kunci yang dianggap benar-benar mengetahui masalah penelitian. Dalam hal ini, informan kunci yang ditentukan antara lain Kepala Desa, Kepala Urusan Pembangunan, dan Tokoh Masyarakat.

Teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif, yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas dan variabel terikat.

Adapun metode statistik yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Product Moment untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan Koefisien determinasi di gunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

D. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan maka keseluruhan data yang diperoleh dari masing-masing variabel penelitian dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden Untuk Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Variabel (X)

No	Nilai Jawaban	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	50-55	Sangat Tinggi	1	1,2%
2	44-49	Tinggi	26	30,2%
3	38-43	Sedang	42	48,8%
4	32-37	Rendah	13	15,1%
5	26-31	Sangat Rendah	4	4,7%
Jumlah			86	100%

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat jawaban responden tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam kategori **sangat tinggi** sebanyak 1 orang responden (1,2%), yang termasuk dalam kategori **tinggi** sebanyak 26 orang responden (30,2%), dan yang termasuk dalam kategori **sedang** sebanyak 42 orang responden (48,8%), dan termasuk kategori **rendah** sebanyak 13 orang responden (15,1%), dan termasuk

kategori **sangat rendah** sebanyak 4 orang responden (4,7%). Hal ini menunjukkan bahwa 42 orang responden (48,8%) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa pada Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sudah termasuk pada kategori cukup baik/edang.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Variabel (Y)

No	Nilai Jawaban	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	52-57	Sangat Tinggi	14	16,3%
2	46-51	Tinggi	43	50%
3	40-45	Sedang	22	25,6%
4	34-39	Rendah	5	5,8%
5	28-33	Sangat Rendah	2	2,3%
Jumlah			86	100%

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat jawaban responden tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam kategori **sangat tinggi**

sebanyak 14 orang responden (16,3%), yang termasuk dalam kategori **tinggi** sebanyak 43 orang responden (50%), dan yang termasuk dalam kategori **sedang** sebanyak 22 orang

responden (25,6%), dan termasuk kategori **rendah** sebanyak 5 orang responden (5,8%), dan termasuk kategori **sangat rendah** sebanyak 2 orang responden (2,3%). Hal ini menunjukkan bahwa 43 orang responden (50%) menunjukkan bahwa gaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sudah termasuk dalam kategori baik.

F. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, penulis menggunakan uji korelasi product moment dimana untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak, untuk menentukan besarnya koefisien korelasi antara dua variabel atau lebih maka analisa korelasi. Untuk mengetahui apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak, dapat dikonsultasikan dengan r tabel product moment, dengan kriteria sebagai berikut: "jika r hitung $>$ r tabel, maka koefisien korelasi signifikan. Jika r hitung $<$ r tabel, maka koefisien korelasi tidak signifikan.

Dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus koefisien korelasi product moment, maka didapat hasil koefisien korelasi sebesar 0,599. Jika dibandingkan dengan nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus koefisien korelasi product moment, maka dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus koefisien korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel koefisien korelasi product moment (0,599 $>$ 0,213), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan pada Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, dengan demikian semakin baik gaya kepemimpinan kepala desa maka semakin baik pula terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan kata lain apabila salah satu variabel mengalami peningkatan, maka variabel yang lain yang terjadi penurunan pada salah satu variabel maka pada variabel yang lainnya berkorelasi akan terjadi penurunan.

Berdasarkan hasil-hasil yang dikemukakan di atas, maka hipotesa yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan antara Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Studi pada Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

Jika nilai responden yang dihasilkan dibandingkan dengan pedoman interpretasi korelasi, maka dapat dilihat bahwa 0,599 terletak pada 0,40-0,599. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur berada pada kategori cukup baik.

Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Variabel Bebas (X) terhadap Variabel Terikat (Y) dapat dihitung dengan rumus koefisien determinan. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan studi pada Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur adalah sebesar 35,8% dan sebaliknya 64,2% yang lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain, yang belum diperhitungkan dalam penelitian ini.

G. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh gaya kepemimpinan kepala Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Naga Rantai Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, maka dapat ditarik sebagai kesimpulan antara lain:

- Dari hasil perhitungan koefisien korelasi pearson product moment, terdapat hasil yang positif dengan kata lain yang berkorelasi dengan variabel tersebut. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan pada Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, berada pada interpretasi sedang. Hal ini berdasarkan perhitungan koefisien korelasi pearson product moment yang menunjukkan angka sebesar 0,599, antara 0,40-0,599.
- Besarnya pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan pada Desa

Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur adalah cukup baik. Hal ini berdasarkan perhitungan koefisien determinan sebesar 35,8%, dan selebihnya 64,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

_____. 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim. 2002. *Perubahan Sosial; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus di Indoneisa*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Alex S, Nitisemito, 1982. *Manajemen Personalia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 1993. *Psikologi Dalam Perusahaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mar'at. 1985. *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Haji Masagung.
- Miftah Thoha. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bina Aksara .
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang. P. 2008. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta :Alfabeta.
- Soekartiwi. 1990. *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1988. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.